

ABSTRAK

Setiap pemberian pembiayaan perlu adanya pertimbangan kehati-hatian agar kepercayaan yang menjadi unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud, sehingga pembiayaan tersebut tepat sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tepat waktu sesuai dengan akad pembiayaan. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan pengawasan secara aktif dan terus menerus sepanjang jangka waktu pembiayaan belum jatuh tempo atau belum terlunasi. Selain itu penyaluran pembiayaan syariah tidak terlepas dari adanya pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhitung tahun 2014.

Pasal 30 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa Pemeriksaan atau pengawasan bank dilakukan setiap tahun secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Pengawasan yang dilakukan setiap tahun dituangkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Perbankan Syariah berupa kewajiban bank syariah untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan. Selain itu dalam pasal ini menyebutkan bahwa bank syariah diwajibkan melakukan pengawasan intern dalam kegiatan usahanya termasuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia dan Pasal 55 *juncto* Pasal 64 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa terhitung per tanggal 31 Desember 2014, Pengaturan dan Pengawasan Bank yang sebelumnya berada di bawah wewenang Bank Indonesia dialihkan ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk tercapainya pengawasan di sektor jasa keuangan secara terintegrasi.

Oleh karena itu, pengawasan produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah tidak terlepas dari Pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas perbankan nasional.

Kata Kunci: Pengawasan Bank Syariah, Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan



KATA PENGANTAR